

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, 2015, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan.1, Genta Publishing, Yogyakarta.

Aripurnami, Sita, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-Aspek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Alumni, Bandung.

Aristeus, Syprianus, 2008, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B, Sampurna et.al, 2005, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam: Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum Sebuah Pengantar*, Pustaka Dwipa, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fajrul Falaakh, Muhammad, 2018, *Panduan Pemantauan Persidangan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta.

Halili, Hasrul, 2003, *Eksaminasi Publik, Dari Persoalan Independensi sampai ke Isu Partisan Dalam Eksaminasi Publik, Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, ICW, Jakarta.

Heraty, Toeti, 2001, *Etika Sosial dalam Perspektif Gender*, Mimeograf, Jakarta.

ICW, 2012, *Laporan Eksaminasi Publik 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi*, ICW, Jakarta.

- Irianto, Sulistyowati et.al, 2017, *Problematisasi Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, PAF, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lotulung, Paulus Effendi, 1993, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Margono, 2015, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Suparman et.al, 1997, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munandar Sulaeman, M., 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Ochtorina Susanti, Dyah dan Efendi, A'an, 2015, *Penelitian hukum (Legal Research)*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- _____, 2000, *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang*, Kompas, Jakarta.
- Rizki Akbari, Anugerah, et.al, 2016, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, MAPPI FH UI, Jakarta.
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Schmidt, H.J., 1891, *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht: Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen enz. Eeerste Deel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink.*
- Sianturi, S.R., 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 1991, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Suadi, Amran, 2020, *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, Cetakan.1, Kencana, Jakarta.
- Sugeng Istanto, F., 2004, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sugiono, Bambang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- SW. Sumardjono, Maria, 2021, *Bahan Kuliah (Metodologi Penelitian Ilmu Hukum)*, Edisi Revisi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tanuwijaya, Fanny dan Sunardi, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang.
- Trisia, Siska et.al, 2020, *Teknik Pembuktian di Persidangan*, MAPPI FH UI, Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Yahya Harahap, M., 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke- 2, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2021, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuntho, Emerson et.al, 2011, *Panduan Eksaminasi Publik*, Cetakan. III, ICW, Jakarta.
- Yuntho, Emerson et.al, 2011, *Panduan Eksaminasi Publik*, Cetakan. III, ICW, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Arya Candra Abhitama dan Kuswardani, “Perbuatan Seksual Atas Dasar Suka Sama Suka Diluar Perkawinan (Kajian Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume.7 Nomor.1, Maret, 2023.
- Calvin Edgar Tengker, “Menggerakkan Orang Yang Belum Dewasa Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Pasal 293 KUHP” *Jurnal Lex et Societatis*, Volume.4, Nomor. 9, Oktober-Desember, 2016.

- Carpini MXD et.al, "Public Deliberations, Discursive Participation, and Citizen Participation: A review of The Empirical Literature, *Jurnal Annual Review of Political Science*, Volume.7, Juni, 2004.
- Cillian McBride, "Reason, Representation, and Participation", *Jurnal Res Publica*, Volume.13, Nomor. 3, April, 2007.
- Denu Pahlawardi, "Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL Atas Nama Terdakwa Antasari Azhar)", *JOM Fakultas Hukum*, Volume.1, Nomor.2, Oktober, 2014.
- Eliza Anggoman, "Penegakkan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex Crimen*, Volume.8, Nomor.3, Maret, 2019.
- Fakhris Lutfianto Hapsoro, et.al, "Studi Kritis Eksaminasi Publik Dalam Mengawasi Putusan Hakim Perkara Korupsi", *Jurnal Yuridis*, Volume.8, Nomor.2, Desember, 2021.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio-Yuridis", *Jurnal Hukum*, Volume.7, Nomor.14, Agustus, 2000.
- Hasanuddin Muhammad, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Surya Kencana Dua*, Volume.9, Nomor.1, Juli, 2022
- Indra Rahmatullah, "Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia", *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume.5, Nomor.5, 2021.
- Iskandar Muda et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Volume.3, Nomor.2, Juni, 2022.
- Ismail Navianto, "Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia", *Jurnal Risalah Hukum*, Volume. 8, Nomor. 1, Juni, 2012.
- Juri Fransiska et.al, "Pembuktian Hakim Dalam Tindak Pidana Perkosaan Perempuan Dengan Kekerasan dan Ancaman", *Jurnal Setara*, Volume.3, Nomor.2, Desember 2022.
- John Dirk Pasalbessy, "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya", *Jurnal Sasi*, Volume.16, Nomor.3, Juli-September, 2010.

- Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center", *Jurnal Studi Gender*, Volume.14, Nomor.2, 2019.
- Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Agama", *Jurnal Konstitusi*, Volume.4, Nomor.1, Juni, 2011.
- Nur Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia", *Jurnal Palastren*, Volume.7, Nomor.1, Juni, 2014.
- Raden Muyazin Arifin, "Fungsi Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Yang Mencerminkan Keadilan", *Jurnal Al-Aslah*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2022.
- Rosalia Dika Agustanti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas", *Jurnal Rechtidee*, Volume.13, Nomor.1, Juni 2018.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt", *Jurnal Yudisial*, Volume. 8, Nomor. 3, Desember, 2015.
- Tatang M. Amirin, "Membedah Konsep dan Teori Partisipasi Serta Implikasi Operasionalnya Dalam Penelitian Pendidikan", *Jurnal Dinamika Pendidikan*, Volume.1, Nomor.7, Maret, 2005.
- Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)", *Balobe Law Jurnal*, Volume.2, Nomor.1, April, 2022.

C. Karya Ilmiah

- Agustini, Tri, 2015, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kota Jambi*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Angelina, Piramitha, 2015, "*'Deskriminalisasi Aborsi' Bagi Korban Perkosaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Ditinjau Dari Viktimologi*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Dwiati, Ira, 2007, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Effendi, Irwan, 2023, "*Problematisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi*", Tesis, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Marzuni, Elfi, 2005, "*Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana*", Tesis, UII, Yogyakarta.

Suadi, Amran, 2016, "*Manajemen Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, dalam Ismail, Kewenangan Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Pemilu Untuk Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil*", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta.

D. Makalah/Pidato

Alkostar, Artidjo, "Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity", *Makalah*, Rakernas Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.

_____, "Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkadilan, dan Konsisten Melalui Putusan-Putusan MA", *Makalah*, Seminar Nasional Prospek Politik Penegakkan Hukum Di Indonesia: Pemberdayaan Peran Istitusi Penegak Hukum dan HAM Dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa, dan Berkeadilan, Yogyakarta, Maret 2009.

Mahkamah Agung RI, "Risalah Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XIX/2021: Perihal Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945", 2021 Jakarta.

Yusti Prabowo R, "Putusan Hakim Pada Perkara Pidana: Kajian Psikologis", *Buletin Psikologi*, Nomor. 1, Agustus 1995.

E. Internet

Arti Kata, "Arti Kata Acuan: Mengenal Lebih Jauh Tentang Pengertian dan Maknanya", <https://ikatandinas.com/arti-kata-acuan-mengenal-lebih-jauh-tentang-pengertian-dan-maknanya/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2023.

Asna Intan, "Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Psikotropika Golongan II Sampai Dengan Golongan IV", www.academia.edu, diakses pada tanggal 18 Juli 2023.

Asr, "Tips Seks Oral Aman Dari Penyakit Seksual Versi CDC", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210520085332-255-644549/tips-seks-oral-aman-dari-penyakit-seksual-versi-cdc>, diakses pada tanggal 03 Januari 2023.

Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Kemenkumham RI, “Usung Tema Gender, Konferensi Alumni Jerman Undang Menkumham Sebagai Keynote Speech”, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/usung-tema-gender-konferensi-alumni-jerman-undang-menkumham-sebagai-keynote-speech>, diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, “Rilis Data SPHPN Tahun 2021, Menteri PPPA: Tidak Boleh Ada Satupun Perempuan yang Alami Kekerasan”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3609/rilis-data-sphpn-tahun-2021-menteri-pppa-tidak-boleh-ada-satupun-perempuan-yang-alami-kekerasan>, diakses pada tanggal 3 Maret 2023.

Choky Ramadhan, “Reformasi Penegakkan Hukum Kekerasan Seksual” <https://law.ui.ac.id/choky-ramadhan-kompas-cetak-reformasi-penegakan-hukum-kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 09 Januari 2023.

Diella Jauza, “Isu Kekerasan Seksual Semakin Marak, Pemerintah Kurang Tanggap?”, <https://ap.uinsgd.ac.id/isu-kekerasan-seksual-semakin-marak-pemerintah-kurang-tanggap/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2023.

Dewi Atiqah, “Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan”, <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses pada tanggal 3 Februari 2023.

Etika Nurmaya, “Menyoal Relasi Kuasa dalam Kasus Kekerasan Seksual”, <https://mubadalah.id/menyoal-relasi-kuasa-dalam-kasus-kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023.

Hendra Budiman, “Anotasi Hukum Putusan Praperadilan”, [https://www.kompasiana.com/hendra_budiman/54f34d3d745513992b6c6fca/](https://www.kompasiana.com/hendra_budiman/54f34d3d745513992b6c6fca/anotasi-hukum-putusan-praperadilan) *anotasi-hukum-putusan-praperadilan*, diakses pada tanggal 7 September 2023.

H. Rifqi Qowiyul Iman, “Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2023.

Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020”, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

Kompas, “Delik Perkosaan Dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/16/19283451/delik-perkosaan-dalam-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

- Kompas.com, "Perjalanan Kasus Mas Bechi, Anak Kiai Jombang yang Terbukti Cabuli dan Perkosa Santri", <https://regional.kompas.com/read/2022/11/18/065600178/perjalanan-kasus-mas-bechi-anak-kiai-jombang-yang-terbukti-cabuli-dan?page=all>, diakses pada tanggal 7 Juli 2023.
- Kongres Advokat Indonesia, "Apa Beda Pencabulan dengan Pemerkosaan? Definisinya Dinilai Perlu Diperbarui", <https://www.kai.or.id/berita/19754/apa-beda-pencabulan-dengan-pemerkosaan-definisinya-dinilai-perlu-diperbarui.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.
- Larastining Retno Wulandari, "Mengenal Eksibisionisme, Apa Penyebab Dari Penyimpangan Seksual Ini?", <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/eksibisionisme/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2023.
- Lina Febriyani, "Relasi Kuasa dalam Tindak Kekerasan Seksual", <https://geotimes.id/opini/relasi-kuasa-dalam-tindak-kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023.
- M. Naufal Filendi, "Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum, dan Kaidah Yurisprudensi", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-legalitas-kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi-lt514810646f40f/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Keadilan Lebih Utama Daripada Kepastian Hukum", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18319&menu=2>, diakses pada tanggal 18 Juli 2023.
- Maria I Tarigan dan Naomi Rehulina Barus, "Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan Dalam Hukum Pidana di Indonesia", <http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 03 Januari 2023.
- Naviatul Munawaroh, "Syarat dan Prosedur Melakukan Visum sebagai Alat Bukti", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-visum-lt51b4b7977c299/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.
- Noer Sida, "Pasal Pemerkosaan Harus Ditegakkan Untuk Keadilan Bersama", <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pemerkosaan/>, diakses pada tanggal 03 Januari 2023.
- Rika Amanda, "Terkuak! Modus Mas Bechi DPO Pencabulan Ngaku Kuasai Ilmu Metafakta, Korban Disuruh Buka Baju Untuk Transfer Ilmu", <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/52346-terungkap-modus-mas-bechi-dpo-pencabulan-ngaku-kuasai-ilmu-metafakta-korban-disuruh-buka-baju-untuk-transfer-ilmu>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023.

Riki Perdana Raya Waruwu, “Menyelami Frasa “Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelami-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-oleh--riki-perdana-rayawaruwu-lt5d59f78ee5f04/?page=3>, diakses pada tanggal 14 Juli 2023.

Siti Tablingah, “Catahu Komnas Perempuan 2022: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Melonjak 50 Persen”, <https://himmahonline.id/berita/catahu-komnas-perempuan-2022-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-melonjak-50-persen/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022.

Tirto.id, “Kasus KS di Pesantren Jombang: Bukti Relasi Kuasa & Victim Blaming”, <https://tirto.id/kasus-ks-di-pesantren-jombang-bukti-relasi-kuasa-victim-blaming-gtS8>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023.

Wahyu Agung Prasetyo, “Vonis 7 Tahun Penjara buat Bechi: Merekam Suara Korban Kekerasan Seksual di PN Surabaya”, <https://projectmultatuli.org/vonis-7-tahun-penjara-buat-bechi-merekam-suara-korban-kekerasan-seksual-di-pn-surabaya/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2023.

Yayasan Kesehatan Perempuan, “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Jenis, dan Cara Melaporkannya”, <https://ykp.or.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2023.

F. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).



Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).